

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP KOREA UTARA

Pada Bab II ini penulis akan membahas tentang politik luar negeri Rusia terhadap Korea Utara pra 2006. Pada tahun 2006 sendiri Korea Utara pertama kali meluncurkan rudalnya yang sampai akhir tahun 2017 pun masih sering melakukan uji coba. Kebijakan ini mengubah pandangan dunia terhadap Korea Utara. Negara ini yang sebelumnya dianggap terbelakang dan terisolasi ternyata mampu dan bisa untuk melakukan uji coba sebuah rudal balistik.

Pada tahun 2006, tepatnya 5 Juli Korea Utara meluncurkan uji coba misil yang berjumlah 7 misil diantaranya 6 SCUDS dan 1 misil Nodong. Misil Nodong ini meledak setelah mengudara sekitar 40 detik paska diluncurkan dan jatuh sekitar 250 km dari Vladivostok, satu misil lainnya jatuh di dekat dengan pelabuhan di kota Nakhodka, sementara dua lainnya jatuh di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Rusia. Vladimir Putin bereaksi dengan mengeluarkan argumen bahwa “Korea Utara memang memiliki hak untuk melakukan uji coba misil, namun yang disesalkan adalah Pyongyang tidak memberikan peringatan terlebih dahulu yang tentunya akan memberikan konsekuensi yang berat.”

Rusia sebagai Negara Super Power

Rusia merupakan negara di timur Eropa dan utara Asia dengan wilayah yang membentang seluas 17.125.200 kilometer persegi. Negara ini merupakan negara dengan wilayah terbesar di dunia yang mencakup seperdelapan wilayah daratan bumi, jumlah penduduk di Rusia menempati kesembilan terbanyak di dunia dengan jumlah 146 juta jiwa pada Maret 2016. Sebelumnya negara ini merupakan Negara sosialis pertama di dunia yaitu Uni Soviet yang hancur dan pecah menjadi 15 negara baru pada tahun 1991. Rusia menjadi negara pewaris terbanyak dari Uni Soviet dibandingkan dengan 14 negara lainnya baik itu dari segi penduduk, wilayah, ekonomi, politik dan bahkan keamanan. Bisa dibayangkan Rusia menjadi negara yang paling berkembang diantara negara-negara pecahan Uni Soviet. Rusia menerapkan bentuk pemerintahan republik federal semi-presidensial.

Setelah mengalami keterpurukan yang luar biasa pasca runtuhnya Uni Soviet, kebangkitan Rusia sungguh mencengangkan dunia. Rusia di era Boris Yeltsin, mengalami kemunduran ekonomi akibat dominasi kaum oligarki yang merampok kekayaan negara. Saking parahnyanya kondisi ekonomi saat itu, bahkan tentara Rusia pernah digaji dengan sayur-mayur karena kekosongan kas negara.

Kemunculan Vladimir Putin dalam panggung politik Rusia yang didukung oleh kaum siloviki membawa sebuah “gebrakan” baru. Setelah memegang jabatan presiden Rusia pada tahun 2000, Putin mengevaluasi

kinerja ekonomi dan bertindak tegas terhadap kaum oligarki. Rusia dibawah presiden Putin tak hanya menjadi kekuatan penyeimbang dalam militer namun juga di bidang ekonomi. Sebagai penyeimbang kekuatan militer, Rusia mampu mencegah Amerika Serikat yang bersikap di Suriah. Di bidang Ekonomi, Rusia menjadi anggota G-20 dan juga BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan South Africa/Afrika Selatan), kelima negara ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia dan dapat menggoyahkan dominasi Amerika Serikat saat ini.

Rusia yang sampai sekarang masih dipimpin oleh Vladimir Putin berkembang menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam kancan ekonomi dan politik global. Elemen utama dari pemerintahan Putin adalah “order”, yakni ketertiban hukum dan penegakan aturan main. Hal ini tampaknya mewarnai program dan kebijakan Putin pada tahun-tahun sepanjang 2000-2008. Putin menjalankan beberapa program dalam pemerintahannya. Program pertama, yang berlangsung dua tahun pertama, adalah memulihkan kekacauan pada kehidupan sosial dan menegakkan disiplin bagi aparat pemerintah. Itu penting agar aparat tak terjebak pada praktek-praktek kotor seperti korupsi, manipulasi dan favoritisme. Program kedua yang berlangsung selama delapan hingga sepuluh tahun berikutnya adalah pengenalan pembangunan ekonomi yang liberal secara moderat dan disesuaikan dengan iklim dan kondisi ekonomi Rusia.

Federasi Rusia dalam hubungan internasional dikenal sebagai negara penerus Uni Soviet. Rusia melanjutkan implementasi komitmen internasional dari Uni Soviet dan mengambil alih kursi permanen soviet di

Dewan Keamanan PBB, keanggotaan di organisasi internasional lain, properti beserta utangnya. Rusia memiliki kebijakan luar negeri yang dinamis, hingga 2009, negara ini menjalin hubungan diplomatik dengan 191 negara dan memiliki 144 kedutaan di seluruh dunia. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh Presiden dan dijalankan oleh menteri luar negeri.

Sebagai satu dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB, Rusia memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Negara ini berpartisipasi dalam Kuartet Timur Tengah dan Pembicaraan Enam Pihak (*Six Party Talks*) mengenai permasalahan Korea Utara. Rusia juga merupakan negara anggota G8, Dewan Eropa dan APEC. Perekonomian Rusia termasuk sebagai pasar berpendapatan tinggi dengan sumber daya alam yang luar biasa, terutama minyak dan gas alam. Negara menempati posisi ke 15 menurut nominal PDB. Sejak awal abad ke 21, konsumsi dalam negeri yang meningkat dan stabilitas politik membawa pertumbuhan ekonomi di Rusia.

Putin berhasil membawa Rusia keluar dari keterpurukan ekonomi dengan catatan prestasi ekonomi yang gemilang. Angka kemiskinan berhasil dikurangi karena keberhasilannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek ini diikuti dengan baik dengan meningkatnya akses kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial. Dengan segudang prestasi ini, Rusia akhirnya memperoleh pujian dari berbagai penjuru dunia. Bahkan negara ini dijadikan contoh negara yang sukses tanpa menggantungkan diri pada bantuan IMF.

Kesuksesan ini pun diikuti oleh pemulihan peran internasional Rusia. Rusia tidak hanya sekedar bangkit tetapi berani menantang dominasi Amerika Serikat. Di Moskow, Rusia sedang menyimak sedikit demi sedikit kelemahan Amerika Serikat saat ini. Amerika Serikat masih berjuang untuk pulih dari krisis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia. Upaya Amerika mengkonsolidasikan dunia yang unipolar terbukti gagal. Di sektor militer, AS menarik pasukannya dari Iraq dan meninggalkan Afghanistan yang tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh membengkaknya anggaran dalam negeri.

Kebangkitan Rusia dianggap sebagai jawaban atas hegemoni barat yang seolah-olah bisa melenggang bebas tanpa hambatan. Peningkatan hubungan dengan China di tahap yang lebih tinggi, harapan Rusia bisa membendung ambisi dari barat. Rusia melangkah lebih maju lagi dengan terang-terangan menentang hegemoni barat yang selama ini berlaku hampir di dunia. Rusia juga ikut serta dalam BRICS, negara-negara perekonomian yang mulai mapan dan stabil, BRICS merupakan tandingan dari Bank Dunia dan IMF.

Sebagai negara yang bisa dikatakan dalam performa “baik” Rusia memiliki berbagai macam kebijakan yang mendukung perkembangan negara ini. Salah satu yang sangat penting dan krusial di mata Putin adalah kebijakan tentang strategi pertahanan. Kebijakan strategi pertahanan nasional Rusia ditanda tangani Putin pada tanggal 31 Desember 2015. Kebijakan ini sebagai pembaharuan dari kebijakan yang sama sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2009. Kebijakan ini megindikasikan

kepentingan strategis dan kepentingan nasional dalam jangka waktu 6 tahun kedepan setelah disahkan.

Strategi kepentingan nasional Rusia mulai tahun 2015 yaitu penguatan pertahanan nasional, menjamin kestabilan politik dan ekonomi, meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya, menjaga dan mengembangkan kebudayaan, meningkatkan perekonomian, dan penguatan status Rusia sebagai pemimpin kekuatan di dunia. Kepentingan nasional ini bisa dicapai dengan mengembangkan 8 prioritas nasional, seperti ;

1. Pertahanan nasional;
2. Keamanan negara dan publik;
3. Pertumbuhan ekonomi;
4. Ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan;
5. Kesehatan & Budaya;
6. Penggunaan sumber daya alam yang rasional;
7. Stabilitas strategis dan kerjasama internasional.¹

Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Korea Utara

Sejak diangkatnya Yeltsin menjadi presiden, Rusia gencar menerapkan program swastanisasi dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan besar Rusia yang merupakan sumber kekayaan ekonomi negara dan menghasilkan devisa bagi kas negara. Kecenderungan Yeltsin kepada AS tak luput dari peran para politikus, ekonom dan kaki tangan yang selalu berada di

¹ Defence Intelligence Agency.2017. *"Russia Military Power:Building a Military to Support Great Power Aspirations"*.Washington D.C. Hal. 16-17

sekelilingnya. Yeltsin bukan saja seorang penggerak utama tetapi juga merupakan kekuatan paling penting dalam sejarah Rusia kala itu. Alasannya adalah semenjak tahun 1990, dia telah menjadi agen utama dalam perubahan politik Rusia, dan menjadi sponsor utama dalam reformasi ekonomi dan demokrasi di Rusia. Di tahun 1991-1998 Rusia telah mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang bagaimana perubahan ekonomi yang layak dapat dijalankan walaupun terdapat oposisi politik yang sangat hebat. Sepanjang tahun itu, Yeltsin memasukkan beberapa pembaharu ekonomi ke dalam pemerintahannya.

Setelah Boris Yeltsin, Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin dan dilanjutkan Vladimir Medvedev sampai tahun 2008. Pada tahun tersebut pula, Vladimir Putin kembali menjadi Presiden sampai sekarang. Stabilitas politik yang dijaga oleh presiden Putin selama kurang lebih 16 tahun ini menjadikan jaminan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa mengeluarkan warga Rusia dari kemiskinan absolut dan menjadikan Rusia sebagai kekuatan ekonomi yang baik di kawasan Eropa dan Asia. Saat ini tampaknya Rusia masih puas dengan keberadaan Putin dan bahkan diperkirakan masih akan unggul dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang berarti ia akan menjabat sebagai presiden sampai tahun 2024. Selama Kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia dibawa menjadi negara yang super power. Selain itu juga menjalin hubungan dengan beberapa negara, salah satunya di kawasan Asia Timur yang memiliki prospek bagus.

Di era kepemimpinannya Putin pula, Rusia mempunyai keinginan untuk melebarkan peran yang lebih di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu fokus

Rusia adalah dengan Korea Utara, dengan memaksimalkan perundingan multilateral. Prioritas bagi Rusia di kawasan Asia Timur adalah pembaruan di bidang Ekonomi, Politik dan Strategi Kemanan. Rusia berusaha mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti China, Jepang, Korea Selatan dan tentunya Korea Utara.

Permasalahan teritorial dan saling klaim yang terjadi di kawasan Asia Timur sudah tidak lagi menjadi masalah yang tersembunyi namun berubah menjadi permasalahan yang nyata di dunia internasional ditambah lagi dengan sikap keras yang ditunjukkan oleh Korea Utara. Isu-isu yang muncul di wilayah Asia Timur ini adalah isu tentang kerjasama keamanan dan integrasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, menjadi hal yang penting bagi Moscow untuk ikut campur dalam kerja sama regional baik itu bilateral maupun multilateral. Politik Luar Negei yang diambil Rusia di wilayah Asia Timur ini juga merupakan kepanjangan dari kepentingan domestik ekonomi dan politiknya.²

Penulis memberikan perhatian yang lebih terhadap hubungan yang sudah terjalin antara Rusia dengan salah satu negara di Asia Timur, yaitu Korea Utara. Hubungan kedua negara ini sangat tergantung dari situasi, kondisi regional di Asia Timur dan juga kebijakan luar negeri keduanya yang terkadang saling bertentangan namun juga ada kalanya saling mensupport. Rusia yang terkena embargo oleh Amerika Serikat mencari sekutu baru di Asia-Pasifik dan sekutu tersebut adalah Korea Utara.

² Alexander Fedorovskiy.2013."Russia's Policy Toward North Korea".*Russian Analytical Digest*.Diunduh dari

Menlu Korea Utara dijadwalkan bertemu dengan sejawatnya dari Rusia, Sergei Lavrov untuk membicarakan perluasan kerja sama bilateral dan krisis di Semenanjung Korea.³ Kunjungan Menlu Korea Utara ke Rusia yang dilakukan di tengah berlanjutnya dialog pejabat tinggi Korea Utara dan Selatan guna meredakan ketegangan dan santernya isu pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Pemimpin Korea Utara, diyakini telah mengubah situasi di Semenanjung Korea. Karena Rusia dan Cina selama ini adalah sekutu Korea Utara, maka lawatan terbaru Pemimpin Korea Utara ke Cina baru-baru ini dan kunjungan beberapa pejabat Pyongyang ke sejumlah negara termasuk Rusia, menjadi isu yang perlu diamati serius.

Korea Utara untuk pertama kalinya secara transparan kepada Amerika mengumumkan kesiapan untuk berdialog seputar upaya pemulihan hubungan terkait nuklir di Semenanjung Korea. Bagi Rusia sendiri isu keamanan di semenanjung Korea masih menjadi perhatian jangka panjang. Kepentingan keamanan di sini termasuk non-poliferasi dan pencegahan kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar.⁴

Rusia memiliki kepentingan ekonomi, politik strategis yang signifikan dalam permasalahan di semenanjung Korea. Kebijakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tidak hanya menguji ketahanan

³ Dikutip dari <http://parstoday.com/id/news/world-i54760-ancaman-as-dan-kedekatan-korea-utara-rusia> diakses pada 24 April 2018

⁴ *Ibid.*

kebijakan baru yang diterapkan Rusia kepada Pyongyang namun juga hubungan diplomatiknya dengan “musuh lamanya” Amerika Serikat.⁵

Masalah Korea tetap menjadi perhatian jangka panjang bagi Rusia karena kombinasi keamanan dan kepentingan ekonomi. Kepentingan keamanan mencakup non-proliferasi dan pencegahan kemungkinan konflik berskala besar serta militerisasi kawasan. Masalah Korea adalah salah satu dari sedikit di Asia di mana Rusia terlibat erat dalam proses diplomatik multilateral bersama dengan AS, Cina, Korea Selatan dan Jepang.

Beberapa peneliti Rusia melihat situasi di Asia Timur Laut stabil, dan tidak ada risiko perang. Namun, pemerintahan Putin tampaknya mempertimbangkan bahwa ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan kemungkinan pecahnya konflik bersenjata tidak dapat dihilangkan. Rusia menganggap Korea Utara sebagai negara Stalinis terakhir di dunia, dan memandangnya sebagai "tetangga yang tidak nyaman", yang telah memulai pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik.

Rusia tertarik untuk membangun dialog politik yang stabil dan dapat diprediksi dengan Pyongyang, dan telah berusaha untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pertukaran ekonomi bilateral dengan Korea Utara dan kerjasama segitiga antara Rusia, Korea Selatan dan Korea Utara. Prioritas ini ditetapkan Putin pada awal 2012 dan tidak mengandung kejutan, hal ini dapat dicirikan sebagai konsistensi kebijakan Rusia terhadap

⁵ Dikutip dari <https://nautilus.org/publications/books/dprkbb/russia/dprk-briefing-book-russian-policy-on-the-north-korean-nuclear-crisis/> diakses pada 13 Februari 2018

Korea Utara selama dekade terakhir. Namun, retorika politik Korea Utara yang agresif selama 2012 dan paruh pertama tahun 2013, dan keputusannya untuk memulai peluncuran rudal dan uji coba nuklir mengeraskan kebijakan Moskow terhadap Pyongyang.

Moskow tidak ingin Korea Utara berfungsi sebagai negara penyangga (*Buffer State*) yang menentang Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, karena ini berarti ketidakstabilan yang berkelanjutan dan konfrontasi di semenanjung Korea. Karena itu, prioritas Rusia adalah menghindari persaingan atau antagonisme diplomatik, dan mendorong kerja sama regional yang luas. Secara umum, Moskow tertarik untuk mencari normalisasi situasi di Semenanjung Korea dan peningkatan kerjasama antar-Korea dan integrasinya dengan dukungan internasional.

Rusia ingin memastikan bahwa ada konsekuensi yang terkendali dan dapat diprediksi. Rusia sedang memantau situasi di semenanjung Korea, untuk memperbaiki kebijakannya terhadap unifikasi Korea mengingat perubahan dalam realitas politik, ekonomi dan keamanan di Semenanjung Korea. Pengurangan ketegangan di Semenanjung Korea dan transisi yang baik menuju unifikasi Korea adalah kepentingan bersama, pada tahap ini mereka belum siap untuk mengadopsi langkah-langkah umum untuk mencegah perkembangan tren negatif di Semenanjung Korea dan bersama-sama mendukung tren positif dalam hubungan antar Korea.⁶

⁶ Alexander Fedorovskiy.2013."Russia's Policy Toward North Korea".*Russian Analytical Digest No.132, 11 July 2013*. Hal 05

Dengan demikian, tren positif dalam hubungan antar-Korea dapat direalisasikan jika komunitas regional di Asia Timur siap untuk mengatasi konfrontasi apa pun dengan tingkat kepercayaan politik yang rendah antara negara-negara ini. Merupakan kepentingan Rusia dan kekuatan regional lainnya untuk tidak hanya menyelesaikan masalah senjata nuklir di semenanjung Korea, tetapi juga untuk memastikan bahwa denuklirisasi Korea menjadi elemen terintegrasi dari sistem keamanan regional.

Selama Korea Utara tetap dalam situasi stagnasi politik, ekonomi dan sosial dan terus menerapkan kebijakan luar negeri yang keras, tidak mungkin bagi Rusia untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara pada tingkat bilateral. Dalam rangka meningkatkan stabilitas regional dan kerja sama internasional, Rusia perlu bekerja sama dengan kekuatan regional lainnya dan mendukung pembicaraan-pembicaraan Lima-pihak (Rusia, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang). Jika tidak, Korea Utara akan menunda reformasi domestik dalam beberapa waktu, dan itu berarti ketidakstabilan berkelanjutan, konfrontasi di semenanjung Korea yang semakin berkepanjangan, dan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan politik.

Rusia dan negara lainnya telah memiliki pengalaman dalam bekerja sama dengan satu sama lain di Dewan Keamanan PBB di Korea Utara pada tahun 2012–2013. Namun dikarenakan pembicaraan enam pihak (*Six Party Talks*) lumpuh, perlu untuk melanjutkan dialog yang luas antara lima negara. Ini berarti bahwa diskusi tentang masa depan Semenanjung Korea akan diintegrasikan ke dalam pembicaraan tentang masalah politik,

keamanan dan ekonomi. Jika kelima negara ini setuju pada keamanan regional dasar, masalah ekonomi dan politik, akan lebih mudah bagi mereka untuk merangsang transisi Korea Utara menuju ekonomi pasar, masyarakat yang lebih terbuka dan untuk mendukung hubungan antar-Korea berskala luas.⁷

Korea Utara melakukan serangkaian uji coba rudal balistik untuk mengancam Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, yang menimbulkan tekanan terhadap Korea Utara meningkat. Selain itu, Korea Utara berniat memproduksi rudal balistik jarak menengah yang bisa mencapai daratan AS dan pangkalan AS di Guam. Namun, menurut Profesor Hubungan Internasional Georgy Toloraya di Universitas Negeri Moskow dan seorang ahli di Semenanjung Korea, 70% dari kegiatan ini terkait dengan urusan domestik Korea Utara.

Sementara Korea Utara telah membenarkan uji coba rudal balistik sebagai "langkah pertahanan diri," Kementerian Luar Negeri Rusia telah menyatakan, melalui juru bicaranya Maria Zakharova, penyesalan dan kekhawatiran atas peluncuran rudal, dilakukan dua kali oleh Korea Utara, yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB. Ini juga mendesak Korea Utara untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mendorong semua negara yang terkait untuk menahan diri. Rusia telah berulang kali mengambil pendekatan ini setiap kali Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik. Rusia menentang uji coba rudal balistik

⁷ *Ibid.* Hal. 06

oleh Korea Utara karena percaya bahwa Amerika Serikat menggunakan ancaman dari Korea Utara tersebut sebagai dalih untuk mempromosikan sistem pertahanan rudal miliknya yaitu THAAD.⁸

Kepentingan Rusia di Konflik Semenanjung Korea

Berbagi perbatasan dengan Korea Utara, Rusia mengharapkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta menghindari keterlibatan dalam konflik militer, dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Tujuan-tujuan ini tetap tidak berubah, bahkan setelah gencatan senjata Perang Korea pada tahun 1953. Apa yang sangat berubah adalah hubungan antara Moscow-Seoul dan Moscow-PyongYang.

Sebagai aktor politik dunia, Rusia memiliki struktur kepentingan nasional yang banyak. Mengenai masalah semenanjung Korea, kepentingan nasional Rusia dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. Pertama adalah minat sebagai aktor global. Rusia ingin dikenal sebagai aktor utama dalam tatanan dunia baru yang dipimpin AS. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Rusia ditentukan oleh hubungan dengan AS. Kedua, ada kepentingan Rusia untuk menjadi aktor regional yang berpengaruh. Negara ini kehilangan pengaruhnya secara signifikan di Asia Timur pada era pasca-Perang Dingin dan kemudian merasa perlu untuk memulihkannya. Ketiga, kepentingan politik domestik Rusia juga terlibat. Karena wilayahnya yang luas, Rusia mengalami masalah domestik terkait dengan ketidakseimbangan perkembangan lokal. Rusia timur jauh khususnya di Siberia berada di bawah ancaman keamanan serius karena

⁸ Saito, Motohide. 2016. *Russian North Korea Policy: Current Status and Future Outlook*. Chapter 10 Pg.166-168

ekonomi terbelakang dan masalah populasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Rusia memulai rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah-daerah tersebut dan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mengembangkan daerah tersebut.⁹

Rusia tidak ingin krisis di Semenanjung Korea terus memanas, pasalnya hal itu akan membuka peluang bagi Amerika untuk meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut dan menambah kekuatan di perairan sekitar Cina dan Korea Selatan yang dianggap mengancam keamanan Rusia secara serius. Semakin ketatnya sanksi Amerika terhadap Korea Utara bersamaan dengan tekanan ekonomi Washington atas Cina, mendorong Korea Utara terus mendekat ke Rusia. Meskipun di saat yang sama Beijing menekankan upaya memperkokoh aliansinya dengan Rusia untuk melawan tekanan Amerika.

Di sisi lain, mengingat sanksi Barat terhadap Rusia, negara ini turut diuntungkan dari permainan dengan kartu Korea Utara, dan Moskow berusaha menunjukkan kepada Amerika bahwa ia berada dalam sebuah koalisi kuat dalam melawan Washington, dengan cara mendukung Pyongyang. Rusia percaya, isu nuklir Korea Utara tidak boleh menjadi dalih bagi Amerika untuk menggulingkan pemerintahan negara itu dan Amerika harus menemukan solusi diplomatik guna mengakhiri krisis di Semenanjung Korea dengan menghentikan tekanan politik dan militer terhadap Pyongyang. Sikap Rusia ini mendapat sambutan baik dari Korea Utara, dan Pyongyang saat ini tengah berusaha menjalin koordinasi dan melakukan negosiasi dengan Rusia dan Cina

⁹ Shin, Beom-Shik.2008."Russia's Northeast Asian Policy and Korean Peninsular". *The Journal of East Asia Affairs*, Vol 22. No.2 pg. 163-195

guna mengatur pertemuan antara Presiden Amerika dan Korea Selatan dengan Pemimpin Korea Utara.

Rusia mendukung resolusi dari UNSC (*United Nations Security Council*) tahun 1965 yang mengutuk setiap peluncuran rudal yang mengancam negara lain, akan tetapi Rusia juga satu sikap dengan China menolak kebijakan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi lebih jauh kepada Korea Utara.¹⁰ Rusia menyatakan siap untuk menengahi sengketa antara Korea Utara dan Amerika Serikat dalam upaya mengurangi ketegangan di Kawasan."Rusia siap jika kedua belah pihak membutuhkannya dan menginginkannya," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan hari Selasa 26 Desember 2017, seperti dikutip kantor berita Rusia TASS. "Tidak mungkin menjadi mediator antara dua partai jika hanya satu sisi yang menginginkan. Kemauan kedua belah pihak dibutuhkan di sini", tambahnya.¹¹

Rusia, satu pihak dengan China untuk menolak pemasangan sistem pertahanan ini yang sebelumnya juga sudah dipasang di Jepang. Presiden Rusia Vladimir Putin berargumen bahwa perlunya mencari solusi-solusi alternatif dan perlunya dialog dengan Korea Utara. Rusia juga kembali setuju dengan usulan yang diajukan oleh Perdana Menteri China untuk melakukan "Double Freeze". Rincian usulan dari PM China ini adalah untuk menutup & menghentikan program uji coba misil dan nuklir Korea Utara serta disisi lain Amerika Serikat

¹⁰ Buszynski, Leszek.2009."Russia and North Korea: Dilemmas and Interests". *Asian Survey* Vol.49 No.5.University of California Press. Hal.809-830

¹¹ Dikutip dari <http://www.dw.com/id/rusia-tawarkan-diri-jadi-penengah-antara-as-dan-korea-utara/a-41941216> diakses pada Selasa, 14 April 2018

& Korea Selatan juga menutup instalasi militer beserta menghentikan latihan-latihan militer yang dilakukan di semenanjung.¹²

Moskow sejak lama mendesak kedua pihak untuk memulai proses negosiasi mengenai program nuklir Korea Utara. Pyongyang beberapa kali melakukan uji coba rudal meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB melarangnya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov diberitakan menyatakan bahwa "retorika agresif Washington tidak dapat diterima". Rusia juga mengkritik kehadiran militer AS yang dinilainya telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.¹³ Rusia menyatakan tidak akan membiarkan adanya perang antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Salah satu alasannya adalah karena Rusia berbatasan langsung dengan Korut. Ketua hubungan internasional di Majelis Rendah Rusia, Konstantin Kosachev menyatakan, AS bisa terus menantang Korut karena mereka tidak berbatasan langsung dengan Korut, sehingga perang tidak akan berdampak langsung pada mereka. Sedangkan pada Rusia, lanjut Kosachev, perang itu akan berdampak langsung karena berbatasan langsung dengan Korut. Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih nyaman, karena wilayahnya berada pada jarak yang jauh dari Korea Utara dan mereka mampu sedangkan Korea Utara akan melakukan apapun untuk melindungi diri dari ancaman eksternal dan karena itu, Pyongyang tidak akan menghentikan program nuklirnya dan Amerika Serikat serta sekutunya memungkinkan adanya skenario intervensi asing dan pemindahan paksa rezim Pyongyang.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*